

BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR / TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);





| PARAF | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|
| KABAG HUKUM | KEP. DESA | ABS I | SEKDA |
| | | | |

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

| PARAF | | | |
|--|---|---|---|
| KABAG. HUKUM | KAB. P. & D. | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 102);

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. J | SEKDA |
|  |  |  |  |

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM


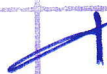
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kabupaten Barito Timur setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa selanjutnya disingkat PKPAD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan aset desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat PPAD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan aset desa.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |





21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
22. Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:
- Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
24. Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
25. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
26. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

BAB II

PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2022 terdiri dari:
- Anggaran Belanja Bidang Kegiatan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
 - SILTAP Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, Insentif Penghulu, Mantir Adat dan Insentif Ketua RT, RW dan Linmas dan 2 (staf) dan bantuan asistensi pengamanan.
- (2) Jumlah ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 51.221.410.000,- (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) Desa.





| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar secara merata dengan lebih dulu memperhitungkan :
 1. siltap dan tunjangan BPD.
 2. insentif Penghulu dan Mantir Adat.
 3. insentif Ketua RT dan RW.
 4. linmas.
 5. 2 (dua) staf dan
 6. bantuan Asistensi Kegiatan oleh Pihak Keamanan di Desa dari total pagu anggaran dibagi kepada 101 desa
 - b. alokasi formula dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan :
 1. jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan.
 2. luas Wilayah.
 3. indeks Kesulitan Geografis Desa, yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022, dialokasikan berdasarkan :
 - a. jumlah perangkat desa yang tersedia.
 - b. jumlah BPD yang tersedia dan
 - c. dihitung berdasarkan banyaknya Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa.

| PARAF | | | |
|--|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ADD Kab} &= \text{Siltap \& Tunjangan + Insentif Penghulu Mantir Ketua RT RW Linmas dan} \\ &\quad \text{Staf + Bantuan Asistensi Kegiatan + AF} \\ \text{AF desa} &= [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \end{aligned}$$





Keterangan:

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa.
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barito Timur.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Barito Timur.
Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barito Timur.
Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Barito Timur.
ADD Kab = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur
AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa.

Pasal 6

SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dihitung dan dibayarkan setiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. SILTAP Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dihitung dan dibayarkan tiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :
1. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.
 2. SILTAP Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.
 3. SILTAP Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.
 4. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan.
 5. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan.
 6. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.
 7. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan.

| PARAF | | | |
|--|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA BPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

- b. Pembayaran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong dari jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % dari jumlah SILTAP atau Upah Minimal Kabupaten (UMK).
- c. Untuk Pembayaran Insentif RT, RW dianggarkan dalam bidang pembinaan dan Insentif Penjabat Kepala Desa dianggarkan dalam Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan perhitungan sebagai berikut :
 1. Insentif Ketua RT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 2. Insentif Ketua RW sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 3. Bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa maka berhak mendapatkan Tunjangan Penjabat Kepala Desa yang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
 4. Bantuan Asistensi Kegiatan Pengamanan oleh pihak keamanan dalam rangka mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibuktikan dengan laporan kegiatan dan foto kegiatan sebagai dasar pembayaran oleh Pemerintah Desa yang diberikan sebesar RP. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 5. Bagi Desa yang mengangkat Staf Desa maka dapat diberikan Insentif Staf Desa paling tinggi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan (disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa).
- d. Untuk Pembayaran Insentif Penghulu Adat dan Mantir Adat dimasukkan dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan perhitungan sebagai berikut :
 1. Insentif Penghulu Adat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 2. Insentif Mantir Adat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

BAB III

PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

| PARAF | | | |
|-------------|---------|--------|-------|
| KABAG HUKUM | KEPAJAO | ASS. I | SEKDA |
| f | N | h | / |

- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGUNAAN ADD





Pasal 8

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. 40% untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. 25% untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - c. 30% Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. 5% untuk Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Desa;
 - e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dihitung berdasarkan jumlah RT.
- (2) Ketentuan mengenai porsi pembagian penggunaan dana boleh tidak sesuai dengan yang diatur sebagaimana tersebut pada ayat (1) namun wajib mendapatkan persetujuan Bupati dan sesuai dengan prioritas kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk membiayai Operasional dan Honorarium, sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
1. Honorarium PKPKD dan PKPAD
 2. Honorarium PPKD dan PPAD;
 3. Insentif Staf Desa;

| PARAF | | | |
|--|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

4. Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas dan lain-lain;
 5. Operasional BPD.
 6. Operasional RT dan RW.
- b. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional BPD serta RW/RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
 - c. ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyusunan profil desa, antara lain untuk :
 1. Biaya internet dan/atau pulsa untuk internet;
 2. Honorarium POKJA;
 3. Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan;
 4. Bantuan transportasi bagi POKJA profil desa/kelurahan.
 - d. Operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pengganti Antar Waktu) /Anggota Pengganti Antar Waktu BPD, dengan kegiatan antara lain :
 1. Honorarium Panitia Desa;
 2. Makan Minum dan/atau Biaya Rapat Panitia Desa;
 3. Belanja alat tulis kantor dan belanja penggandaan; dan
 4. Biaya lain-lain untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara.




Pasal 10

- (1) Honorarium PKPKD dan PKPAD serta PPKD dan PPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, nilai atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Insentif Staf Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a angka 3 yaitu terdiri dari Pengelola Administrasi Keuangan, jaga malam dan Petugas Kebersihan Kantor Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 11

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b untuk Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Operasional dan Kegiatan PKK;
- b. Operasional dan Kegiatan POSYANDU;

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEP LA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

- c. Operasional dan Kegiatan PAUD/TK Desa;
- d. Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat Desa;
- e. Operasional dan Kegiatan Karang Taruna;
- f. Operasional dan Kegiatan LPMD/KPMD; dan
- g. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Operasional LINMAS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 12





ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c untuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk membiayai Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa seperti bimbingan dan pelatihan perangkat desa, administrasi keuangan desa serta pelatihan kelembagaan desa lainnya.

Pasal 13

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d untuk Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan berulang dan/atau berada diluar kendali Pemerintah Desa.
- (3) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Pasal 14

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e untuk pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan gotong royong di Desa.

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

Pasal 15

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah (lahan), bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dan sejenisnya) dan pembangunan tempat ibadah baru.

BAB V

PENYALURAN ADD

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan nilai tiap tahap.

Pasal 17

Penyaluran Tahap I sebesar 20 % (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a sebagai Uang Persediaan (UP) bagi desa untuk mengawali kegiatan dari pagu ADD, dapat dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen Perdes APBDes TA. 2021.

Pasal 18

Penyaluran Tahap II sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2022;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap II tahun anggaran 2022;

| PARAF | | | |
|--|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPLA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (20%);
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- e. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dan ceklis dari Kecamatan (Camat).

Pasal 19

Penyaluran Tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran 2022;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap III tahun 2022;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II (60%);
- d. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap III tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dan ceklis dari Kecamatan (Camat).

BAB VI PENGELOLAAN ADD

Pasal 20

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

| PARAF | | | |
|-------------|------------|--------|-------|
| KABAG HUKUM | KEP/LA ODD | ASS. I | SEKDA |
| ✍ | ✍ | ✍ | ✍ |

- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PPKD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 22





Pembinaan terhadap Pelaksanaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Camat se-Kabupaten Barito Timur.

Pasal 23

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan tugas meliputi :
- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;

| PARAF | | | |
|--|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I ... | SEKDA |
|  |  |  |  |

- d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan Pelaksana Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait yang berasal dari Laporan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi:
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Membantu Pelaksanan Kegiatan dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi Pelaksanan Kegiatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
 - f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. Merekomendasikan pencairan ADD dari Rekening Kas Desa ke Pemerintah Desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDDesa dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Kegiatan;
 - h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD dan jika dibutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan khusus (Riksus) bagi Desa yang diduga melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan dana;
 - i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD; dan
 - j. Menyampaikan Kompilasi Laporan Realisasi Penggunaan ADD dari masing-masing desa.

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. T... | SEKDA |
|  |  |  |  |

Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur pada DPA OPD masing-masing.

Pasal 25

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26


Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional (APIP) atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KEPESERTAAN BPJS

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan penghasilan tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berhak atas Jaminan Kesehatan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretaris Desa;
 - b. kepala seksi;
 - c. kepala urusan; dan
 - d. kepala dusun.
- (3) Pasangan suami dan istri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan/atau Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggaraan Negara diwajibkan keduanya di daftarkan menjadi peserta oleh masing-masing Pemberi Kerja.
- (4) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu Kepala Urusan sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (5) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membayar iuran sesuai ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

| PARAF | | | | |
|--|---|---|---|--|
| KABAG HUKUM | KEPALA DESA | ASS I | SEKDA | |
|  |  |  |  | |

BAB IX
IURAN DAN TATA CARA PEMOTONGAN

Bagian Kesatu

Besaran Iuran

Pasal 28



- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari nominal SILTAP.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Belanja Perangkat Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta, yang dalam hal ini berasal dari SILTAP.

Bagian Kedua

Iuran Oleh Pemberi Kerja

Pasal 29

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pembayaran Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 huruf a, dari alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA DESA | ATS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

Bagian Ketiga
Iuran Oleh Peserta

Pasal 30

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dari SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan.
- (2) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.
- (3) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB X
MASA JAMINAN KESEHATAN


Pasal 31

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan terhitung sejak didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan Iuran.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, secara otomatis pemberian Jaminan Kesehatan diberhentikan.
- (3) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB XI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran Iuran dilakukan setelah adanya tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan pencairan ADD.

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

(3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. BPJS Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran Iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati Barito Timur cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dengan dilampiri daftar Peserta BPJS Kesehatan;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;
- c. Apabila dokumen permohonan pembayaran BPJS Kesehatan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya meneruskan permohonan pembayaran Iuran kepada Bupati Barito Timur cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penyetoran Iuran sebesar 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui rekening virtual account 1% (satu persen) untuk Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) oleh PPKD selaku BUD.
- e. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% sebagaimana dimaksud huruf d dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pencairan ADD.
- f. Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membayar Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% (empat persen) melalui Rekening virtual account 4% (empat persen).

Pasal 33

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

BAB XII

REKONSILIASI

Pasal 34





- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran

Pasal 35

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

Pasal 36

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berdasarkan:
 - a. realisasi pembayaran Iuran oleh pemerintah kabupaten melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD dan BPJS Kesehatan.

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAGHUKUM | KABALAKO | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal 2 Februari 2022

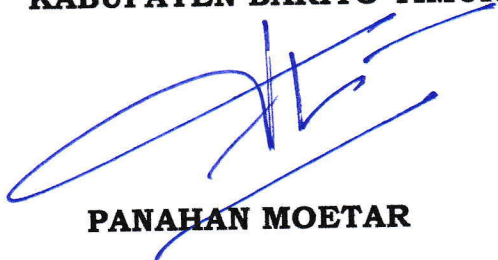
BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Barito Timur
pada tanggal 2 Februari 2022





SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

| Daftar Koordinasi | |
|-------------------|--------------------|
| 1 | Wakil Bupati |
| 2 | Sekretaris Daerah |
| 3 | Asisten I |
| 4 | Kabag Hukum |
| 5 | Kepala DPMD |
| 6 | Sekretaris / Kabid |

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR¹⁰⁴

| PARAF | | | |
|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|  |  |  |  |

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

PERUBAHAN KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | | | Alokasi Formula | | | | | | | | | | Total Bobot | Alokasi Formula | Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa | | | | |
|-----|-------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | Slipap | Insentif Penghulu, Mantri Adat dan Insentif Ketua RT dan RW dan Linnas dan 2 star (sar kaw dan CS) | Bantuan Asistensi Kegiatan Pengamanan | Jumlah Penduduk | | | | | Luas Wilayah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot | Indeks Keutuhan Geografis | | | | Rasio Indeks Keutuhan Geografis | Bobot | Indeks Keutuhan Geografis | Rasio Indeks Keutuhan Geografis |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) = (6) + (20) | |
| 1 | Dusun Timur | Pulau Patal | 243.060.000 | 61.200.000 | 9.600.000 | 313.860.000 | 494 | 0,005684957 | 0,000568496 | 23 | 0,007508978 | 0,003754489 | 182,6310768 | 0,049040075 | 0,007356113 | 0,007356113 | 37,04380338 | 0,002976872 | 0,002442181 | 0,014121278 | 238.622.000 | 552.482.000 |
| 2 | Dusun Timur | Sarapat | 292.560.000 | 67.200.000 | 9.600.000 | 349.760.000 | 869 | 0,10000046 | 0,001000046 | 12 | 0,003917728 | 0,001958864 | 80,19960735 | 0,021535502 | 0,003420325 | 33,0876706 | 0,0088639 | 0,002146597 | 0,008335832 | 140.859.000 | 510.219.000 | |
| 3 | Dusun Timur | Ngagitis | 270.800.000 | 70.800.000 | 9.600.000 | 348.600.000 | 1561 | 0,017964003 | 0,001796403 | 9 | 0,002983896 | 0,001469148 | 90,43870883 | 0,024284926 | 0,003642739 | 34,72231311 | 0,00901093 | 0,00252646 | 0,009160933 | 154.022.000 | 503.462.000 | |
| 4 | Dusun Timur | Jear | 291.060.000 | 156.000.000 | 9.600.000 | 446.060.000 | 2927 | 0,033683944 | 0,003368394 | 39 | 0,012732615 | 0,006366308 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 213.441.000 | 580.101.000 | |
| 5 | Dusun Timur | Marabu | 268.260.000 | 88.800.000 | 9.600.000 | 356.060.000 | 2762 | 0,031785122 | 0,003178512 | 38 | 0,012406138 | 0,006203069 | 30,0637287 | 0,008072551 | 0,001210883 | 31,42382688 | 0,00815461 | 0,002038653 | 0,012631117 | 219.410.000 | 480.470.000 | |
| 6 | Dusun Timur | Dorong | 243.060.000 | 73.200.000 | 9.600.000 | 316.260.000 | 962 | 0,01070705 | 0,001070705 | 20 | 0,006529546 | 0,003264773 | 25,05227392 | 0,006272126 | 0,000936416 | 30,89715266 | 0,00910944 | 0,00227758 | 0,007658273 | 123.423.000 | 423.683.000 | |
| 7 | Dusun Timur | Didi | 243.060.000 | 57.600.000 | 9.600.000 | 300.660.000 | 582 | 0,00697562 | 0,000697562 | 19 | 0,006030369 | 0,003101534 | 23,29861474 | 0,006242773 | 0,000986416 | 30,89715266 | 0,00801394 | 0,002020448 | 0,006712201 | 119.423.000 | 408.656.000 | |
| 8 | Dusun Timur | Karang Langit | 243.060.000 | 72.000.000 | 9.600.000 | 315.060.000 | 789 | 0,00907982 | 0,000907982 | 7 | 0,002285341 | 0,001142671 | 23,29861474 | 0,006242773 | 0,000986416 | 30,89715266 | 0,00801394 | 0,002020448 | 0,006712201 | 119.423.000 | 408.656.000 | |
| 9 | Dusun Timur | Herigen | 267.360.000 | 80.400.000 | 9.600.000 | 347.760.000 | 884 | 0,012732615 | 0,006366308 | 39 | 0,012732615 | 0,006366308 | 28,5959226 | 0,007668924 | 0,00115039 | 42,3143393 | 0,00745191 | 0,0021784102 | 0,011318056 | 191.253.000 | 545.320.000 | |
| 10 | Dusun Timur | Jaweten | 293.460.000 | 88.800.000 | 9.600.000 | 391.860.000 | 1960 | 0,022785859 | 0,002278585 | 26 | 0,00448841 | 0,002244205 | 26,1846367 | 0,007031192 | 0,00115039 | 42,3143393 | 0,00745191 | 0,0021784102 | 0,011318056 | 191.253.000 | 545.320.000 | |
| 11 | Dusun Timur | Marah | 243.060.000 | 72.000.000 | 9.600.000 | 316.600.000 | 796 | 0,009160376 | 0,000916038 | 23 | 0,003754489 | 0,001958864 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 12 | Dusun Timur | Mangrap | 243.060.000 | 48.400.000 | 9.600.000 | 291.460.000 | 665 | 0,007658273 | 0,000765826 | 14 | 0,004750878 | 0,002385341 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 13 | Dusun Timur | Meragut | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 14 | Dusun Timur | Gumpa | 243.060.000 | 63.600.000 | 9.600.000 | 306.660.000 | 818 | 0,006847266 | 0,000684727 | 13 | 0,004244205 | 0,002122103 | 20,0421913 | 0,005381701 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 15 | Dusun Timur | Sumur | 243.060.000 | 51.600.000 | 9.600.000 | 294.660.000 | 595 | 0,00595323 | 0,000595323 | 5 | 0,001633287 | 0,000816193 | 68,0796517 | 0,01833973 | 0,000765827 | 29,96552546 | 0,00778137 | 0,001945342 | 0,00559434 | 122.502.000 | 426.762.000 | |
| 16 | Dusun Timur | Harara | 243.060.000 | 51.600.000 | 9.600.000 | 294.660.000 | 595 | 0,00595323 | 0,000595323 | 5 | 0,001633287 | 0,000816193 | 68,0796517 | 0,01833973 | 0,000765827 | 29,96552546 | 0,00778137 | 0,001945342 | 0,00559434 | 122.502.000 | 426.762.000 | |
| 17 | Dusun Timur | Kandris | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 18 | Dusun Timur | Banyu Landas | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 19 | Dusun Timur | Sagik | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 20 | Dusun Timur | Banbau | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 21 | Dusun Timur | Teweh Pupuh | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 22 | Dusun Timur | Guadang Seng | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 23 | Dusun Timur | Pulau Prati | 243.060.000 | 61.200.000 | 9.600.000 | 313.860.000 | 478 | 0,005508029 | 0,000550803 | 12 | 0,003917728 | 0,001958864 | 80,16777653 | 0,02152648 | 0,003420325 | 33,0876706 | 0,0088639 | 0,002146597 | 0,008335832 | 140.859.000 | 510.219.000 | |
| 24 | Dusun Timur | Kamblian | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 495 | 0,005694685 | 0,000569468 | 13 | 0,004244205 | 0,002122103 | 70,4636696 | 0,001883595 | 0,000328239 | 46,2419307 | 0,00199995 | 0,00299996 | 0,005974275 | 202.057.000 | 613.117.000 | |
| 25 | Dusun Timur | Ramania | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 495 | 0,005694685 | 0,000569468 | 13 | 0,004244205 | 0,002122103 | 70,4636696 | 0,001883595 | 0,000328239 | 46,2419307 | 0,00199995 | 0,00299996 | 0,005974275 | 202.057.000 | 613.117.000 | |
| 26 | Dusun Timur | Bantot | 293.460.000 | 79.200.000 | 9.600.000 | 372.660.000 | 2297 | 0,026433898 | 0,00264339 | 31 | 0,013120797 | 0,00630398 | 51,0663879 | 0,007803466 | 0,00117052 | 40,5812491 | 0,010531 | 0,002346335 | 0,015494726 | 254.208.000 | 618.368.000 | |
| 27 | Dusun Timur | Ampani Bura | 267.360.000 | 80.400.000 | 9.600.000 | 347.760.000 | 831 | 0,0095653156 | 0,000956531 | 63 | 0,020268071 | 0,008651648 | 45,15595051 | 0,012155437 | 0,001818816 | 57,74605868 | 0,01496534 | 0,003746339 | 0,015494726 | 254.208.000 | 618.368.000 | |
| 28 | Dusun Timur | Koram | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 29 | Dusun Timur | Belang Nalong | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 30 | Dusun Timur | Mawani | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 31 | Dusun Timur | Jango | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 32 | Dusun Timur | Lalap | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 311.460.000 | 493 | 0,005673449 | 0,000567345 | 15 | 0,004897216 | 0,00244858 | 45,09409305 | 0,012108827 | 0,001816324 | 33,5632066 | 0,00611475 | 0,001528687 | 0,013079713 | 127.879.000 | 418.939.000 | |
| 33 | Dusun Timur | Janah Jari | 243.060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50 | Dusun Tengah | 243.060.000 | 85.200.000 | 9.600.000 | 337.860.000 | 0,00757227 | 0,000757227 | 31 | 0,010120797 | 0,005060398 | 120.250.948 | 0,032290206 | 0,04434531 | 45,77939579 | 0,01187994 | 0,002356986 | 0,013631142 | 230.340.000 | 568.200.000 |
| 51 | Dusun Tengah | 243.060.000 | 80.400.000 | 9.600.000 | 333.060.000 | 0,014304456 | 0,019762161 | 59 | 0,019762161 | 0,023691082 | 45,77939579 | 0,012339472 | 0,001850921 | 34,05568425 | 0,00883759 | 0,002209398 | 0,015121845 | 255.530.000 | 588.590.000 |
| 52 | Pematang Karau | 243.060.000 | 122.400.000 | 9.600.000 | 361.860.000 | 0,017607255 | 0,001760725 | 147 | 0,047962165 | 0,023691082 | 45,77939579 | 0,012339472 | 0,006942394 | 37,51626789 | 0,00973563 | 0,002433907 | 0,035133109 | 593.670.000 | 993.930.000 |
| 53 | Pematang Karau | 243.060.000 | 84.000.000 | 9.600.000 | 341.860.000 | 0,012555238 | 0,001555238 | 105 | 0,034280118 | 0,017100569 | 45,77939579 | 0,011570657 | 0,001735599 | 37,51626789 | 0,00973563 | 0,002433907 | 0,035133109 | 593.670.000 | 993.930.000 |
| 54 | Pematang Karau | 243.060.000 | 72.000.000 | 9.600.000 | 314.860.000 | 0,012808415 | 0,001280841 | 159 | 0,025969892 | 0,025969892 | 45,77939579 | 0,013992439 | 0,00298883 | 51,00029439 | 0,01323834 | 0,00298883 | 0,035133109 | 593.670.000 | 993.930.000 |
| 55 | Pematang Karau | 243.060.000 | 104.400.000 | 9.600.000 | 382.260.000 | 0,017043362 | 0,001704336 | 32 | 0,010447724 | 0,010447724 | 45,77939579 | 0,004305361 | 0,00045804 | 30,29932576 | 0,0078628 | 0,0019507 | 0,009539477 | 181.993.000 | 431.653.000 |
| 56 | Pematang Karau | 243.060.000 | 60.000.000 | 9.600.000 | 312.660.000 | 0,009369336 | 0,000936934 | 10 | 0,007623877 | 0,007623877 | 45,77939579 | 0,00151572 | 0,00169528 | 49,60493279 | 0,01288201 | 0,003220502 | 0,007041818 | 116.090.000 | 477.952.000 |
| 57 | Pematang Karau | 243.060.000 | 79.200.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,007388142 | 0,000738814 | 24 | 0,007388142 | 0,007388142 | 45,77939579 | 0,00169528 | 0,000847618 | 48,40939729 | 0,01256543 | 0,003141358 | 0,008645518 | 146.092.000 | 477.952.000 |
| 58 | Pematang Karau | 243.060.000 | 80.400.000 | 9.600.000 | 333.060.000 | 0,01761186 | 0,001761186 | 38 | 0,007388142 | 0,007388142 | 45,77939579 | 0,00151572 | 0,000847618 | 48,40939729 | 0,01256543 | 0,003141358 | 0,008645518 | 146.092.000 | 477.952.000 |
| 59 | Pematang Karau | 243.060.000 | 88.800.000 | 9.600.000 | 341.860.000 | 0,008170687 | 0,000817069 | 71 | 0,023179889 | 0,01589944 | 42,02509148 | 0,00329021 | 0,000484353 | 36,69803092 | 0,00592329 | 0,002380823 | 0,015271288 | 258.070.000 | 599.330.000 |
| 60 | Pematang Karau | 243.060.000 | 93.600.000 | 9.600.000 | 346.260.000 | 0,008055607 | 0,000805561 | 107 | 0,034933072 | 0,017466336 | 91,1907705 | 0,024466739 | 0,003673011 | 36,69803092 | 0,00592329 | 0,002380823 | 0,015271288 | 258.070.000 | 599.330.000 |
| 61 | Pematang Karau | 243.060.000 | 42.400.000 | 9.600.000 | 315.460.000 | 0,007992135 | 0,000799213 | 22 | 0,01785201 | 0,00359125 | 26,05436487 | 0,006996211 | 0,000484353 | 36,69803092 | 0,00592329 | 0,002380823 | 0,015271288 | 258.070.000 | 599.330.000 |
| 62 | Pematang Karau | 243.060.000 | 82.800.000 | 9.600.000 | 335.460.000 | 0,008412355 | 0,000841235 | 70 | 0,009739419 | 0,00489716 | 12,02509148 | 0,00329021 | 0,000484353 | 36,69803092 | 0,00592329 | 0,002380823 | 0,015271288 | 258.070.000 | 599.330.000 |
| 63 | Pematang Karau | 243.060.000 | 98.400.000 | 9.600.000 | 397.060.000 | 0,008078623 | 0,000807862 | 39 | 0,017372615 | 0,006369108 | 12,02509148 | 0,00329021 | 0,000484353 | 36,69803092 | 0,00592329 | 0,002380823 | 0,015271288 | 258.070.000 | 599.330.000 |
| 64 | Pematang Karau | 243.060.000 | 72.000.000 | 9.600.000 | 324.660.000 | 0,005017492 | 0,000501749 | 14 | 0,004570682 | 0,00285341 | 14,3010978 | 0,008748247 | 0,005812237 | 32,74682429 | 0,01368487 | 0,0032454924 | 0,010207763 | 172.491.000 | 523.551.000 |
| 65 | Pematang Karau | 243.060.000 | 74.400.000 | 9.600.000 | 324.660.000 | 0,013579451 | 0,001357945 | 4 | 0,004570682 | 0,00285341 | 14,3010978 | 0,008748247 | 0,005812237 | 32,74682429 | 0,01368487 | 0,0032454924 | 0,010207763 | 172.491.000 | 523.551.000 |
| 66 | Pematang Karau | 243.060.000 | 75.600.000 | 9.600.000 | 324.660.000 | 0,005295446 | 0,000529546 | 20 | 0,005295446 | 0,000529546 | 17,12756433 | 0,016414188 | 0,006924231 | 32,74682429 | 0,01368487 | 0,0032454924 | 0,010207763 | 172.491.000 | 523.551.000 |
| 67 | Pematang Karau | 243.060.000 | 51.600.000 | 9.600.000 | 309.260.000 | 0,005295446 | 0,000529546 | 1 | 0,00329021 | 0,00329021 | 17,12756433 | 0,016414188 | 0,006924231 | 32,74682429 | 0,01368487 | 0,0032454924 | 0,010207763 | 172.491.000 | 523.551.000 |
| 68 | Pematang Karau | 243.060.000 | 56.400.000 | 9.600.000 | 324.660.000 | 0,005295446 | 0,000529546 | 221 | 0,005295446 | 0,000529546 | 17,12756433 | 0,016414188 | 0,006924231 | 32,74682429 | 0,01368487 | 0,0032454924 | 0,010207763 | 172.491.000 | 523.551.000 |
| 69 | Pematang Karau | 243.060.000 | 76.800.000 | 9.600.000 | 332.260.000 | 0,01600074 | 0,001600074 | 108 | 0,01600074 | 0,001600074 | 17,12756433 | 0,016414188 | 0,006924231 | 32,74682429 | 0,01368487 | 0,0032454924 | 0,010207763 | 172.491.000 | 523.551.000 |
| 70 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 344.260.000 | 0,008348515 | 0,000834851 | 4 | 0,001305909 | 0,000652955 | 20,04181331 | 0,003581701 | 0,000652955 | 20,04181331 | 0,003581701 | 0,000652955 | 0,003581701 | 110.493.000 | 431.553.000 |
| 71 | Pematang Karau | 243.060.000 | 92.400.000 | 9.600.000 | 344.260.000 | 0,008348515 | 0,000834851 | 31 | 0,001305909 | 0,000652955 | 20,04181331 | 0,003581701 | 0,000652955 | 20,04181331 | 0,003581701 | 0,000652955 | 0,003581701 | 110.493.000 | 431.553.000 |
| 72 | Pematang Karau | 243.060.000 | 92.400.000 | 9.600.000 | 344.260.000 | 0,008348515 | 0,000834851 | 28 | 0,009141365 | 0,004570682 | 17,12756433 | 0,016414188 | 0,006924231 | 32,74682429 | 0,01368487 | 0,0032454924 | 0,010207763 | 172.491.000 | 523.551.000 |
| 73 | Pematang Karau | 243.060.000 | 92.400.000 | 9.600.000 | 344.260.000 | 0,008348515 | 0,000834851 | 51 | 0,016603043 | 0,008323171 | 21,99589679 | 0,003581701 | 0,000652955 | 20,04181331 | 0,003581701 | 0,000652955 | 0,003581701 | 110.493.000 | 431.553.000 |
| 74 | Pematang Karau | 243.060.000 | 92.400.000 | 9.600.000 | 344.260.000 | 0,008348515 | 0,000834851 | 19 | 0,006230369 | 0,003101534 | 22,5169838 | 0,006230369 | 0,003101534 | 22,5169838 | 0,006230369 | 0,003101534 | 0,006230369 | 110.493.000 | 431.553.000 |
| 75 | Pematang Karau | 243.060.000 | 92.400.000 | 9.600.000 | 344.260.000 | 0,008348515 | 0,000834851 | 16 | 0,00523637 | 0,002611818 | 38,07945635 | 0,002611818 | 0,002611818 | 38,07945635 | 0,002611818 | 0,002611818 | 0,002611818 | 110.493.000 | 431.553.000 |
| 76 | Pematang Karau | 243.060.000 | 92.400.000 | 9.600.000 | 344.260.000 | 0,008348515 | 0,000834851 | 559 | 0,006432977 | 0,000643298 | 0,000643298 | 0,000643298 | 0,000643298 | 0,000643298 | 0,000643298 | 0,000643298 | 0,000643298 | 110.493.000 | 431.553.000 |
| 77 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 78 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 79 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 80 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 81 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 82 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 83 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 84 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 85 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 86 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 87 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 88 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 89 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 90 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 91 | Pematang Karau | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 331.860.000 | 0,006801234 | 0,000680123 | 38 | 0,011755183 | 0,005876592 | 8,54785886 | 0,00295295 | 0,000344381 | 39,84736365 | 0,0034056 | 0,002341608 | 0,007356629 | 127.353.000 | 454.413.000 |
| 92 | Pematang Karau | 243.060.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Besaran dan Peruntukkan ADD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Pagu ADD | Silap Kades, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD | Institusi Penghulu, Mantri Adat dan Institusi Ketua RT dan RW dan Umhas dan 2 staf (staf keu dan CS) | Bantuan Asistensi Kegiatan Pengamanan | Bidang Pembangunan (Gotong Royong) | Sisa Kolom 5, 6, 7, 8 | Bidang Penyelenggaraan Pemdes (40%) | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (25%) | Bidang Pemberdayaan Masyarakat (30%) | Bidang Penanggulangan Bencana (5%) |
|-----|-----------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Dusun Timur | Pulau Patal | 552.482.000 | 243.040.000 | 61.200.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 226.622.000 | 90.648.800 | 56.655.500 | 67.986.600 | 11.331.100 |
| | | Sarapat | 510.219.000 | 292.560.000 | 67.200.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 116.859.000 | 46.743.600 | 29.214.750 | 35.057.700 | 5.842.950 |
| | | Maganis | 503.462.000 | 268.260.000 | 70.800.000 | 9.600.000 | 36.000.000 | 118.802.000 | 47.520.800 | 29.700.500 | 35.640.600 | 5.940.100 |
| | | Jaar | 677.682.000 | 291.040.000 | 156.000.000 | 9.600.000 | 84.000.000 | 137.022.000 | 54.808.800 | 34.255.500 | 41.106.600 | 6.851.100 |
| | | Matabu | 580.101.000 | 268.260.000 | 88.800.000 | 9.600.000 | 48.000.000 | 165.441.000 | 66.176.400 | 41.360.250 | 49.632.300 | 8.272.050 |
| | | Dorang | 480.470.000 | 268.260.000 | 73.200.000 | 9.600.000 | 18.000.000 | 111.410.000 | 27.852.500 | 27.852.500 | 33.423.000 | 5.570.500 |
| | | Didi | 423.683.000 | 243.060.000 | 57.600.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 101.423.000 | 40.569.200 | 25.355.750 | 30.426.900 | 5.071.150 |
| | | Karang Langit | 406.656.000 | 243.060.000 | 72.000.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 57.996.000 | 64.501.200 | 40.313.250 | 48.375.900 | 2.899.800 |
| | | Harigen | 548.613.000 | 267.360.000 | 80.400.000 | 9.600.000 | 30.000.000 | 161.233.000 | 46.984.000 | 29.365.000 | 35.238.000 | 8.062.650 |
| | | Jaweten | 545.370.000 | 293.460.000 | 88.800.000 | 9.600.000 | 36.000.000 | 117.460.000 | 48.220.400 | 30.137.750 | 36.165.300 | 6.027.550 |
| | | Matarah | 469.211.000 | 243.060.000 | 72.000.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 98.635.000 | 39.454.000 | 24.658.750 | 29.590.500 | 4.931.750 |
| | | Maragut | 413.695.000 | 243.060.000 | 44.400.000 | 9.600.000 | 18.000.000 | 109.879.000 | 43.951.600 | 27.469.750 | 32.963.700 | 5.493.950 |
| | | Mangkarap | 448.939.000 | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 18.000.000 | 121.489.000 | 48.595.600 | 30.372.250 | 36.446.700 | 6.074.450 |
| | | Gumpa | 484.549.000 | 243.060.000 | 80.400.000 | 9.600.000 | 30.000.000 | 75.943.000 | 30.377.200 | 18.985.750 | 22.782.900 | 3.797.150 |
| | | Sumur | 410.203.000 | 243.060.000 | 63.600.000 | 9.600.000 | 18.000.000 | 116.502.000 | 46.600.800 | 29.125.500 | 34.950.600 | 5.825.100 |
| | | Harara | 426.762.000 | 243.060.000 | 51.600.000 | 9.600.000 | 6.000.000 | 1.957.287.000 | 782.914.800 | 489.321.750 | 587.186.100 | 97.844.350 |
| | | | 7.882.047.000 | 4.136.740.000 | 1.196.400.000 | 153.600.000 | 438.000.000 | | | | | |
| 2 | Banua Lima | Kandris | 430.050.000 | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 18.000.000 | 90.990.000 | 36.396.000 | 22.747.500 | 27.297.000 | 4.549.500 |
| | | Banyu Londas | 381.508.000 | 243.060.000 | 57.600.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 59.248.000 | 23.699.200 | 14.812.000 | 17.774.400 | 2.962.400 |
| | | Bagok | 419.671.000 | 243.060.000 | 67.200.000 | 9.600.000 | 18.000.000 | 81.811.000 | 32.724.400 | 20.452.750 | 24.543.300 | 4.090.550 |
| | | Barnan | 489.448.000 | 243.060.000 | 82.800.000 | 9.600.000 | 30.000.000 | 123.988.000 | 49.595.200 | 30.997.000 | 37.196.400 | 6.199.400 |
| | | Tewah Pupuh | 509.916.000 | 243.060.000 | 97.200.000 | 9.600.000 | 36.000.000 | 124.056.000 | 49.622.400 | 31.014.000 | 37.216.800 | 6.202.800 |
| | | Gudang Seng | 372.732.000 | 243.060.000 | 57.600.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 50.472.000 | 20.188.800 | 12.618.000 | 15.141.600 | 2.523.600 |
| | | | 2.603.325.000 | 1.458.360.000 | 430.800.000 | 57.600.000 | 126.000.000 | 530.545.000 | 212.226.000 | 132.641.250 | 159.169.500 | 26.528.250 |
| 3 | Patangkep Tutui | Pulau Padang | 407.128.000 | 243.060.000 | 61.200.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 81.268.000 | 32.507.200 | 20.317.000 | 24.380.400 | 4.063.400 |
| | | Kambitin | 399.804.000 | 243.060.000 | 57.600.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 77.544.000 | 31.017.600 | 19.386.000 | 23.263.200 | 3.877.200 |
| | | Ramania | 420.814.000 | 243.060.000 | 67.200.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 88.954.000 | 35.581.600 | 22.238.500 | 26.686.200 | 4.447.700 |
| | | Benitot | 613.117.000 | 293.460.000 | 108.000.000 | 9.600.000 | 54.000.000 | 9.600.000 | 59.222.800 | 37.014.250 | 44.417.100 | 7.402.850 |
| | | Ampari Bura | 610.368.000 | 267.360.000 | 79.200.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 230.208.000 | 92.083.200 | 57.552.000 | 69.062.400 | 11.510.400 |
| | | Kotam | 588.100.000 | 243.060.000 | 79.200.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 232.240.000 | 92.896.000 | 58.060.000 | 69.672.000 | 11.612.000 |

PARAF

KORAGHUKH KOPALAWO ASS. I. SEKDA

f N /

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-----|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 8 | Raren Batuah | Puri | 531.329.000 | 268.260.000 | 92.400.000 | 9.600.000 | 30.000.000 | 52.427.600 | 32.767.250 | 39.320.700 | 6.553.450 |
| | | Lenggang | 510.940.000 | 268.260.000 | 79.200.000 | 9.600.000 | 42.000.000 | 129.880.000 | 32.470.000 | 38.964.000 | 6.494.000 |
| | | Batuah | 562.814.000 | 243.060.000 | 93.600.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 69.821.600 | 43.638.500 | 52.366.200 | 8.727.700 |
| | | Unsum | 481.271.000 | 268.260.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 36.000.000 | 81.011.000 | 32.404.400 | 24.303.300 | 4.050.550 |
| | | Baruyan | 431.553.000 | 243.060.000 | 68.400.000 | 9.600.000 | 18.000.000 | 92.493.000 | 23.123.250 | 27.747.900 | 4.624.650 |
| | | Turan Amis | 484.184.000 | 243.060.000 | 79.200.000 | 9.600.000 | 30.000.000 | 122.324.000 | 30.581.000 | 36.697.200 | 6.116.200 |
| | | Malintut | 502.922.000 | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 30.000.000 | 133.862.000 | 33.465.500 | 40.158.600 | 6.693.100 |
| | | Tangkum | 482.367.000 | 243.060.000 | 87.600.000 | 9.600.000 | 30.000.000 | 112.107.000 | 28.026.750 | 33.632.100 | 5.605.350 |
| | | Sibung | 682.814.000 | 268.260.000 | 136.800.000 | 9.600.000 | 72.000.000 | 196.154.000 | 49.038.500 | 58.846.200 | 9.807.700 |
| | | | 4.670.194.000 | 2.288.340.000 | 810.000.000 | 86.400.000 | 312.000.000 | 1.173.454.000 | 293.363.500 | 352.036.200 | 58.672.700 |
| 9 | Paku | Tampa | 555.930.000 | 268.260.000 | 93.600.000 | 9.600.000 | 42.000.000 | 142.470.000 | 35.617.500 | 42.741.000 | 7.123.500 |
| | | Kalamus | 664.718.000 | 292.560.000 | 102.000.000 | 9.600.000 | 42.000.000 | 87.423.200 | 54.639.500 | 65.567.400 | 10.927.900 |
| | | Simpang Bingkuang | 427.289.000 | 243.060.000 | 74.400.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 76.229.000 | 19.057.250 | 22.868.700 | 3.811.450 |
| | | Putung | 424.857.000 | 243.060.000 | 72.000.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 30.478.800 | 19.049.250 | 22.859.100 | 3.809.850 |
| | | Runggu Raya | 552.800.000 | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 36.000.000 | 71.096.000 | 44.435.000 | 53.322.000 | 8.887.000 |
| | | Bantai Napu | 454.413.000 | 243.060.000 | 74.400.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 41.341.200 | 25.838.250 | 31.005.900 | 5.167.650 |
| | | Tarising | 401.908.000 | 243.060.000 | 73.200.000 | 9.600.000 | 18.000.000 | 23.219.200 | 14.512.000 | 17.414.400 | 2.902.400 |
| | | Paku Belo | 444.525.000 | 243.060.000 | 66.000.000 | 9.600.000 | 18.000.000 | 43.146.000 | 26.966.250 | 32.359.500 | 5.393.250 |
| | | Gandirung | 508.884.000 | 267.360.000 | 72.000.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 54.369.600 | 33.981.000 | 40.777.200 | 6.796.200 |
| | | Pangkan | 504.941.000 | 243.060.000 | 69.600.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 65.872.400 | 41.170.250 | 49.404.300 | 8.234.050 |
| | | Kupang Baru | 398.195.000 | 243.060.000 | 67.200.000 | 9.600.000 | 18.000.000 | 24.134.000 | 15.083.750 | 18.100.500 | 3.016.750 |
| | | Luau Jawuk | 431.117.000 | 243.060.000 | 72.000.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 32.982.800 | 20.614.250 | 24.737.100 | 4.122.850 |
| | | | 5.769.577.000 | 3.015.720.000 | 922.800.000 | 115.200.000 | 312.000.000 | 561.542.800 | 350.944.250 | 421.157.100 | 70.192.850 |
| 10 | Karusen Janang | Dayu | 702.567.000 | 268.260.000 | 117.600.000 | 9.600.000 | 60.000.000 | 98.842.800 | 61.776.750 | 74.132.100 | 12.355.350 |
| | | Wuran | 566.423.000 | 243.060.000 | 120.000.000 | 9.600.000 | 54.000.000 | 55.905.200 | 34.940.750 | 41.928.900 | 6.988.150 |
| | | Ipu Mear | 440.261.000 | 243.060.000 | 76.800.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 34.720.400 | 21.700.250 | 26.040.300 | 4.340.050 |
| | | Lagan | 462.273.000 | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 39.685.200 | 24.803.250 | 29.763.900 | 4.960.650 |
| | | Putuf Tawuluh | 421.847.000 | 243.060.000 | 57.600.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 99.587.000 | 24.896.750 | 29.876.100 | 4.979.350 |
| | | Simpang Nohang | 402.467.000 | 243.060.000 | 86.400.000 | 9.600.000 | 24.000.000 | 15.762.800 | 9.851.750 | 11.822.100 | 1.970.350 |
| | | Kandris | 389.502.000 | 243.060.000 | 60.000.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 64.842.000 | 16.210.500 | 19.452.600 | 3.242.100 |
| | | | 3.385.340.000 | 1.726.620.000 | 604.800.000 | 67.200.000 | 210.000.000 | 310.688.000 | 194.180.000 | 233.016.000 | 38.836.000 |
| | | | 51.221.410.000 | 25.445.740.000 | 7.908.000.000 | 969.600.000 | 2.676.000.000 | 5.688.820.000 | 3.555.512.500 | 4.266.615.000 | 711.102.500 |
| | | Total | | | | | | | | | |

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A. Y. MEBAS

| Paraf Koordinasi | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1 | Wakil Bupati | | | | |
| 2 | Sekretaris Daerah | | | | |
| 3 | Asisten I | | | | |
| 4 | Kabag Hukum | | | | |
| 5 | Kepala DPMMD | | | | |
| 6 | Sekretaris / Kabid | | | | |

| PARAF | | | |
|-------------|------------|--------|--------|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEK. I |
| | | | |